

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, maka perlu penulis tegaskan istilah-istilah fungsional yang terdapat dalam judul.

1. Pendampingan Masyarakat

Pendampingan masyarakat adalah proses interaksi antara dua komponen (masyarakat dan relawan/pendamping) untuk saling memberi informasi dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi (masyarakat).¹

2. Yayasan Patria Nusantara

Yayasan patria Nusantara adalah suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang layanan bantuan sosial.²

Berdasarkan dari pengertian dan penjelasan singkat di atas tersebut, maka yang dimaksud dengan judul : "Pendampingan Masyarakat Oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta" proses interaksi antara pendamping (Yayasan Patria Nusantara) dengan masyarakat dampingannya yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

¹ Laporan Pelaksanaan Lokakarya Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Implementasi Program Pengembangan Ekonomi Rakyat, th. 1997, Sekretariat Bina Desa, hal. 4.

² Dokumen Yayasan Patria Nusantara, 1997.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dicanangkan dan dimotori oleh pemerintah pada masa Orde Baru yang memiliki rumusan “untuk rakyat” menyangkut ekonomi, sosial, politik, dan budaya pada kenyataannya memiliki peran lebih dominan dalam pembangunan dimana semua rencana pembiayaan dan evaluasi dilakukan pemerintah. Sedangkan pemerintah merupakan bagian dari golongan orang-orang elit. Sehingga hanya yang memiliki kedudukan saja yang mempunyai kekuasaan, dengan kata lain pada masa Orde Baru Indonesia mengimplementasikan sistem pembangunan kapitalis. Kaum teknokrat dan birokrat pada waktu itu memelopori menjadi agen pembangunan

Misi pembangunan yang diterapkan “hanya memberi” tanpa mau tahu apakah yang diberikan itu yang dibutuhkan rakyat. Menganggap rakyat kecil tidak mengerti apa-apa. Walaupun pembangunan dikatakan untuk rakyat, tetapi tidak sepenuhnya dilakukan oleh rakyat, melainkan dilakukan terutama dikendalikan oleh pemerintah, orang asing, teknokrat dan birokrat serta oleh golongan pemilik modal yang mengurus berbagai kepentingan rakyat. Dengan demikian masyarakat termarginalkan.

Dalam berbagai proyek rakyat atau kelompok-kelompok masyarakat seolah-olah hanya dijadikan objek mobilisasi atau sekedar melaksanakan rencana dari atas. Bentuk lain dari marginalisasi rakyat adalah tidak bisa ikutnya suatu kelompok dalam suatu pembangunan atau akibat suatu proyek pembangunan masyarakat tersisihkan dan diganti oleh teknologi serta orang asing. Dalam hal ini tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa rakyat pasif, padahal sebelum ada

proyek rakyat sudah bekerja. Ketika pembangunan datang dihadapan mereka, kegiatan mereka tergesur, maka diharapkan seharusnya mereka bereaksi melawan.

Pembangunan yang ada adalah bersifat pragmatis. Karena itu, yang pertama kali dilakukan oleh pragmatisme pembangunan itu adalah usaha stabilisasi politik dengan berbagai cara, sehingga stabilisasi politik itu sesungguhnya merupakan cara yang sangat berlawanan dengan cita-cita pembangunan itu sendiri. Dengan cara itu, rakyat tidak saja dijadikan objek pembangunan akan tetapi bersamaan dengan itu rakyat dikurangi hak-hak dasarnya untuk menentukan bentuk kehidupan kehidupan serta masa depannya sendiri. Rekayasa sosial dilakukan sedemikian rupa, sehingga kerakyatan tidak memperoleh maknanya yang hakiki—yakni kehidupan yang bebas, berdaulat, manusiawi dan yang berkeadilan—akan tetapi kerakyatan telah tereduksi menjadi obyek yang harus menanggung segala penderitaan demi suksesnya pembangunan.³

Dengan pendekatan pragmatis serta penekanan pertumbuhan dan stabilisasi politik yang berlebihan itu, muncul ironi pembangunan. Di satu sisi, pertumbuhan Gross National Product (GNP) melonjak, akan tetapi di sisi lain muncul kemiskinan baru yang sifatnya absolut dan berwatak struktural.

Pada masa Orba pembangunan yang bersifat fisik benar-benar tampak nyata dan bisa dirasakan manfaatnya, terutama di daerah pedesaan. Hasil yang dapat dilihat antara lain sebagai berikut; pada periode 1969 – 1973 Pemerintah memperkenalkan varietas padi unggul dan menyebarkannya ke seluruh Jawa, bersamaan dengan pupuk pabrik dan pestisida. Kredit petani disediakan lewat

³ Dokumen YPN tahun 1999.

program Bimas. Sistem irigasi dipulihkan kembali. Terjadi perubahan penting dalam kelembagaan agraris yang mendorong ke pemusatan kepemilikan lahan dan juga pengurangan pemakaian tenaga kerja per hektare dan per musim dalam usaha tani padi. Selama periode ini, keseimbangan kekuasaan dalam pasar lahan dan tenaga kerja bergeser ke pihak yang menguasai lahan dan peluang kerja. Sedikit orang yang meninggalkan desa mencari pekerjaan.⁴ Intinya konsep dasarnya adalah pembangunan pedesaan. Salah satu hasilnya adalah panen raya yang biasanya dilakukan selama satu kali setahun, bisa menjadi tiga atau bahkan empat kali dalam setahun. Hal ini didukung dengan pengenalan dan adopsi cepat varietas padi tahan wereng, IR 36 dan IR 38, dan didukung cuaca yang baik. Pengenalan alat dan mesin-mesin pemanen, seperti dari ani-ani (ketam) diganti dengan sabit yang proses pemangkasan batang padi bisa lebih banyak dan lebih cepat, juga mesin perontok padi. Juga pembangunan sarana irigasi berupa waduk atau bendungan dibangun dimana-mana. Konsep itulah yang mengakibatkan masyarakat dimobilisasi besar-besaran yang hingga melupakan harkat martabat manusia itu sendiri.

Pada permulaan Pelita V diperkirakan masih terdapat 30 juta rakyat miskin, makna kemiskinan di situ adalah dalam arti sesungguhnya. Di satu sisi kualitas fisik meningkat—seperti pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur industri—terdapat proses penurunan kualitas dan martabat manusia. Dan yang lebih menimbulkan ironi justru dalam suasana keterbukaan ekonomi, bersamaan dengan itu penanganan hak asasi manusia sangat rapuh, terutama pendekatan sekuriti yang berlebihan terhadap bekas aktivis partai terlarang beserta keluarganya.

⁴ William L. Collier, dkk. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa, Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*, Terj. Sajogyo, Jakarta, 1996, Yayasan Obor Indonesia, hal. 33

Identifikasi persoalan-persoalan kerakyatan di atas di satu sisi, ditambah lagi kenyataan lain yakni bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan baik yang berbasis agama maupun sosial, tidak banyak membantu penuntasan masalah, karena lembaga-lembaga itu tidak kurang pragmatismenya. Bahkan lembaga-lembaga itu telah terkooptasi menjadi “mitra kerja” pemerintah atau menjadi perpanjangan kepentingan pemerintah, yang dengan itu mereka mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dari pemerintah. Namun dampak nyata bagi proses demokratisasi, konsientasi dan peningkatan kualitas dan martabat manusia tidak banyak terlihat, kecuali memperkuat struktur organisasi/lembaga itu sendiri.

Dalam perspektif ini lahirlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM adalah suatu lembaga yang didirikan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu dengan tujuan sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dengan visi dan misi yang berbeda-beda, dan bisa berasal dari masyarakat sendiri atau oleh negara (membantu kelancaran proyek negara) dan dalam hal ini mereka terdorong untuk melakukan pendampingan. Dalam kegiatan ini, LSM menjadi mitra rakyat dalam mengembangkan kesadaran mereka terutama melalui pengembangan kemampuan rakyat dalam bidang sosial ekonomi. Bentuk-bentuk kegiatan LSM misalnya bantuan hukum, modal usaha, pendidikan populer, dan sebagainya yang mana dalam implementasinya pendamping lebih terbuka untuk dapat belajar dari rakyat. Sehingga nantinya diharapkan pembangunan dari rakyat dan untuk rakyat.

Dalam khasanah kepustakaan tentang LSM di Indonesia muncul istilah tentang berbagai generasi LSM-LSM, generasi awal lebih merupakan lembaga sukarela untuk memberikan bantuan dan santunan sosial. Generasi kedua, mulai

memperkenalkan pengembangan usaha swadaya, lewat kelompok-kelompok kecil dari masyarakat rentan. Semboyan mereka adalah memberi kail bukan sekedar ikan. Generasi ketiga, mulai berinteraksi dengan membuat kebijaksanaan dan berperan sebagai semacam konsultan untuk berbagai program yang memerlukan dukungan swadaya masyarakat. Generasi keempat, menggerakkan keprihatinan publik dengan melakukan kampanye tentang lingkungan hidup, hak-hak konsumen atau hak-hak asasi manusia. Tentu saja yang terakhir kecuali generasi pertama, semua ini lebih merupakan titik berat kegiatan daripada spesialisasi yang eksklusif. Ada juga LSM yang melakukan kegiatan-kegiatan itu kesemuanya sekaligus. Dalam kenyataannya LSM memiliki pandangan dasar, metode kerja dan tujuan yang relatif sama. Berbagai forum dan jaringan yang banyak dibentuk sejak tahun 1980an, baik di daerah, di tingkat nasional, maupun internasional menyebabkan munculnya suatu komunitas yang khas, yang bilamana perlu bisa bertindak bersama.

Suatu hal menarik dalam komunitas itu adalah telah berkurangnya tarikan primordial masing-masing, hingga LSM dari berbagai aliran dan latar belakang bisa bertemu untuk kepentingan bersama. Masih ada unsur tengah mainstream yang bisa menjadi acuan bersama. Unsur *mainstream* tersebut adalah usaha menggerakkan partisipasi masyarakat dan pembelaan hak rakyat.

Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta muncul sebagai sebuah LSM yang melakukan pengembangan masyarakat melalui pendampingan masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat petani karena melihat masyarakat Yogyakarta masih banyak yang bertani terlebih lagi di pedesaan, di mana para petani masih membutuhkan pendampingan dalam proses melakukan pengembangan dalam pertanian begitu pula

dalam pembelaan atas hak-hak petani, seperti dalam hal pertanian yang seringkali membuat masyarakat terkecoh akan hal-hal yang mereka belum begitu pasti paham akan dampak negatifnya di antaranya mengenai intensifikasi pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian dengan melaksanakan padat teknologi kimiawi seperti misalnya pemakaian; (1) Pupuk anorganik untuk meningkatkan kesuburan tanah, (2) Insektisida untuk memberantas cendawan, (3) Rotentisida untuk memberantas binatang pengerat dan lain sebagainya. Padahal perlu disadari bahwa bahan kimia yang dikemukakan di atas pada dasarnya adalah racun, yang tidak hanya berbahaya bagi hama tetapi juga bagi lingkungan dan manusianya. Dengan demikian peningkatan produksi pangan sejalan dengan peningkatan penyebaran racun yang berbahaya.

Dalam menanggapi hal ini Yayasan Patria Nusantara melakukan pendampingan, karena yayasan ini menganggap masyarakat pedesaan sebenarnya telah memiliki kemampuan (petani sebagai aset ilmu pengetahuan secara alami didapatkan secara turun temurun dan bersifat naluriah, yang mana petani dapat lebih kuat bila di banding para penyuluh yang berlandaskan teori, sebagaimana bapak bangsa Bung Karno pernah berkata bahwa petani adalah “soko guru revolusi” yang mampu melakukan perubahan di negeri ini) Bertolak dari tanggapan Yayasan Patria Nusantara di atas mereka melakukan pendampingan masyarakat pedesaan yang mana sangat membutuhkan uluran tangan yang peduli akan nasib pedesaan, yang kalau hanya mengandalkan kemampuan masyarakat saja maka perubahan kemungkinan tidak akan terjadi tanpa pendampingan.

Berlatar belakang dari masalah di atas dan dalam upaya pengembangan masyarakat, di antaranya melalui pendampingan masyarakat yang di lakukan oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta.

Suatu hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti terhadap pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta, adalah Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta merupakan lembaga atau yayasan yang memiliki kepedulian terhadap proses pengembangan masyarakat, hal ini dipandang representatif dengan substansi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Muncul rasa penasaran penulis untuk meneliti secara objektif, eksistensi Yayasan Patria Nusantara dan konsistensi perjuangannya dalam melakukan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran problematika masyarakat yang di dampingi oleh Yayasan Patria Nusantara?
2. Bagaimana pelaksanaan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran problematika masyarakat yang di dampingi oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta.
2. Mengetahui pelaksanaan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengembangan masyarakat terutama dalam pendampingan masyarakat, sehingga diharapkan mampu memiliki ilmu secara teoritis dan secara praktisnya sesuai dengan konteksnya dan dari deskripsi pendampingan masyarakat ini yang diharapkan memberi masukan dalam kajian pengembangan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih kompreherensif didalam penelitian masalah yang sama atau penelitian yang berhubungan dan bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang ada pada penelitian ini.

F. Landasan Teori

1. Gambaran Masyarakat Pedesaan

a. Pengertian Masyarakat Pedesaan

Pengertian desa dan daerah setingkat desa ditinjau dari segi hukum ketata-negeraan di mana desa merupakan unit pemerintah terendah hirarkis

langsung di bawah Kecamatan (Surat Keputusan Mendagri No. s.d. 18/4/24 tanggal 12 Agustus 1969).⁵

Konsep desa dalam Undang-Undang No 5 Th.1979, Desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dan kebanyakan orang mendefinisikan desa difahami dalam sudut pandang ini.

Demikian juga para ahli pedesaan telah bersepakat bahwa desa adalah suatu bentuk pemukiman yang khas di kawasan terbuka dengan ciri-ciri tertentu, yaitu:

- 1) Pada umumnya desa terletak di atau sangat dekat dengan pusat-pusat wilayah pertanian.
- 2) Dalam wilayah itu pertanian (dalam arti luas) merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
- 3) Karenanya faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- 4) Populasi penduduk desa lebih bersifat tergantung pada dirinya sendiri, berbeda dengan di kota di mana sebagian besar penduduknya merupakan pendatang.

⁵ Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan-Kumpulan Bacaan*, Jilid 2, Yogyakarta, 1992, Gajah Mada University Press. hal. 136

⁶ Esrom Aritonang, dkk. *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2001, hal. 38.

- 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara sesamaarganya lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
- 6) Mempunyai homogenitas yang relatif tinggi.⁷

Dari kedua keterangan di atas dapat di definisikan masyarakat desa adalah sekumpulan individu-individu dan keluarga yang menempati sebuah wilayah yang saling berdekatan, ditandai oleh aspek-aspek kehidupan bersama seperti kesamaan dalam cara produksi, kebiasaan atau tradisi dan bentuk bahasa.

Pada masyarakat desaarganya mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam, dikarenakan rasa kekeluargaan yang mereka miliki. Pada umumnya masyarakat desa hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang bata dan sebagainya. Akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan disamping pertanian hanyalah merupakan pekerjaan sambilan saja.

Cara bertani masih tradisional dan kurang efisien, karena belum dikenalkannya mekanisasi dalam pertanian. Biasanya mereka bertani semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan tidak untuk dijual, walau ada sebagian penduduk yang menjual. Mereka merasa puas apabila kebutuhan keluarga tercukupi.

Golongan orang tua pada masyarakat desa biasanya memiliki peranan penting. Pengendalian sosial masyarakat desa sangat kuat, sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali mengubah jalan pikiran yang sosial ke arah jalan pikiran

⁷ *Ibid*, hal. 39.

ekonomis, hal mana juga disebabkan karena kurangnya sarana informasi. Salah satu alat komunikasi yang berkembang adalah desas-desus. Sebagai akibat sistem komunikasi yang tradisional tadi hubungan antara seseorang dengan orang lain dapat diatur dengan seksama yang kemudian menimbulkan saling mengenal dan saling menolong (adanya sifat gotong royong). Walaupun sistem komunikasi tersebut bisa dikatakan sederhana tetapi ini merupakan keunggulan masyarakat pedesaan untuk menyebarluaskan dan mempertahankan suatu pengetahuan, seperti halnya yang dituliskan Chambers, keunggulan pengetahuan rakyat desa adalah kemampuannya untuk mempertahankan, meluaskan dan membetulkannya. Ke dalam kemampuan ini termasuk ketajaman pengamatan, ingatan yang baik secara terinci, dan penyebarannya melalui pelajaran permagangan dan cerita dari mulut ke mulut. Sistem penyebaran pengetahuan seperti ini sangat diperlukan, karena banyaknya ilmu dan pengetahuan yang hilang dan yang harus diganti, karena pengetahuan masyarakat desa juga mudah hilang dan disesuaikan dengan keadaan. Banyak pengetahuan yang diperoleh masyarakat desa didasarkan melalui pengamatan langsung dan kesaksian.⁸

b. Ciri-ciri Masyarakat Pedesaan

Dengan mengacu pada pengertian masyarakat pedesaan di atas maka yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain:

- 1) Didalam masyarakat pedesaan diantara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat desa lainnya diluar batas-batas wilayahnya.

⁸ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 115.

- 2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok-kelompok dengan dasar kekeluargaan.
- 3) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian.
- 4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat dan sebagainya.

Bila didasarkan pada tingkah laku dan sifat-sifat masyarakat desa secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai rakyat yang menetap.
- 2) Mempunyai wilayah desa yang tegas batas-batasnya.
- 3) Mempunyai pamong desa dengan lurah sebagai pucuk pimpinan.
- 4) Memperlihatkan kegiatan-kegiatan masyarakat sebagai kesatuan desa.⁹

c. Potensi desa.

Potensi desa merupakan kemampuan yang mungkin dapat diaktifkan dalam pembangunan mencakup alam, manusianya, serta hasil kerja manusia itu sendiri. Komponen potensi desa tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Alami :
 - a) Lokasi
 - b) Luas desa
 - c) Keadaan tanah
 - d) Keadaan air
 - e) Keadaan alam nabati dan hewani
- 2) Manusia :
 - a) Jumlah penduduk
 - b) Penyebaran (*density*)

⁹ Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan-Kumpulan Bacaan*, Jilid 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. hal. 36.

- c) Karakteristiknya
- (1) Susunan umur
 - (2) Susuna kelamin (seks)
 - (3) Adat istiadat dan agama
 - (4) Organisasi masyarakat
 - (5) Pendidikan
 - (6) Kesehatan dan tingkat nutrisi
 - (7) Swadaya masyarakat dan gotong royong
- 3) Kegiatan ekonomi :
- a) Agraris (primer)
 - (1) Pertanian
 - (2) Perikanan
 - (3) Peternakan
 - (4) Pengumpulan hasil hutan
 - b) Industri/kerajinan (sekunder)
 - c) Perdagangan dan jasa-jasa (tersier)
- 4) Prasarana :
- a) Prasarana perhubungan dan komunikasi
 - b) Prasarana pengairan/irigasi dan produksi
 - c) Prasarana pemasaran/pasar-pasar, kios-kios, dan lain-lain
 - d) Prasarana pendidikan kesehatan dan agama (sosial budaya).¹⁰

¹⁰ Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Jilid 2, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, Hal. 137

Dari penggolongan potensi desa di atas, dapat dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:

- 1) Memiliki swadaya manusia yang tinggi
- 2) Masyarakat desa cenderung memiliki hubungan yang kuat dengan alam
- 3) Kontak sosial terjadi lebih banyak dengan tatap muka, ramah tamah (informal) dan pribadi (antara penduduk)
- 4) Memiliki keadaan masyarakat yang homogen¹¹
- 5) Ada kegiatan tolong-menolong (gotong-royong) dan musyawarah.¹² Sistem tolong-menolong atau biasanya berupa tambahan tenaga semisal dalam pekerjaan pertanian tidak disewa tetapi *diminta* dari sesama warga desa, ialah pertolongan pekerjaan yang di dalam bahasa Jerman disebut *bitarbeit* (*bitten* = meminta) atau yang dalam bahasa Jawa disebut *sambatan* (*sambat* = minta tolong), oleh umum di Indonesia disebut gotong royong.¹³
- 6) Adanya musyawarah sebagai solusi pemecahan masalah. Musyawarah dilakukan sebagai suatu gejala sosial, artinya ialah bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasarkan suara mayoritas, yang menganut suatu pendirian tertentu, melainkan seluruh rapat, seolah-olah sebagai suatu badan. Hal ini tentu berarti bahwa baik pihak mayoritas maupun pihak minoritas mengurangi pendirian mereka masing-masing, sehingga bisa dekat-mendekati.¹⁴

¹¹ Munandar Solaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konseptual Ilmu Sosial*, Presco, Bandung, 1995, hal. 74.

¹² *Ibid*, hal. 82.

¹³ Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan-Kumpulan Bacaan*, Jilid 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. hal. 27.

¹⁴ *Ibid*, hal 31.

7) Nilai-nilai agama masih dipegang kuat dan lain sebagainya.

Potensi-potensi desa yang tersebut di atas, tidak semuanya dimiliki oleh seluruh pedesaan yang ada di Indonesia, mengingat pemerataan pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak merata dan masih ada ketimpangan-ketimpangan di desa-desa tertentu, terutama yang tergolong desa di daerah terpencil ataupun terpelosok. Dampak yang muncul adalah adanya perbedaan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang ada pada masyarakat tersebut. Adapun kekurangan-kekurangan yang muncul pada masyarakat desa, antara lain:

- 1) Keterbatasan akses pada faktor ekonomi seperti lahan pertanian, modal, kesempatan kerja, dan teknologi pertanian.¹⁵
- 2) Faktor sosial budaya seperti; kurangnya pendidikan dan keterampilan
- 3) Fasilitas dan pelayanan kesehatan kurang memadai.
- 4) Kurangnya fasilitas memperoleh informasi, komunikasi dan perkembangan kemajuan teknologi secara cepat.

Melihat dari beberapa potensi di atas, yang mana bahwasanya masyarakat pedesaan merupakan gudang ilmu pengetahuan, karena pengetahuan rakyat pedesaan merupakan sumber daya nasional yang luar biasa namun kurang dimanfaatkan. Dengan demikian sebenarnya potensi masyarakat pedesaan dapat dijadikan peluang untuk melakukan pengembangan masyarakat yang dalam hal ini melalui pendampingan masyarakat pedesaan, dengan melakukan beberapa cara, diantaranya; menjadi fasilitator pada masyarakat pedesaan yang didampingi dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang mereka

¹⁵ Esrom Aritonang, dkk. *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2001, hal. 16.

miliki, sehingga nantinya mereka dapat mandiri dan dapat mencapai kemakmuran yang diharapkan. Kemampuan otot serta kemampuan otak diharapkan dapat seimbang melalui pemanfaatan potensi dan kelemahan yang merupakan pengetahuan masyarakat pedesaan.¹⁶

2. Pendampingan Masyarakat

a. Pengertian Pendampingan Masyarakat

Pendamping adalah seorang atau kelompok yang dengan kesadarannya memiliki kepedulian untuk menjadi sahabat masyarakat dalam upaya merubah realitasnya yang tidak manusiawi menjadi realitas yang humanis. Sedangkan pendampingan adalah suatu proses persahabatan yang terjadi dalam masyarakat untuk menemukan identitasnya yang utuh, sehingga terjadi proses transformasi dan demokratisasi.

Istilah pendampingan, berasal dari kata "damping", dimana prinsip dasar dari pendampingan ini adalah egaliter atau kesederajatan kedudukan. Dan dengan demikian seorang pendamping masyarakat adalah bertugas berperan melakukan pendampingan dalam artian menemani atau bermitra dengan masyarakat adalah duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya rakyat agar mampu membela diri.¹⁷

Menurut Marzuki Kurdi, pendampingan, yakni hubungan antara dua subyek yang dialogis yang obyeknya adalah masalah atau kebutuhan subyek

¹⁶ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 120.

¹⁷ *Ibid*, hal. 8

yang didampingi. Tujuannya untuk mengembalikan harkat manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Sedangkan strateginya adalah merubah dari dalam dan mempengaruhi dari luar (transformasi sosial), sementara pendampingan berfungsi membantu kedua-duanya.¹⁸

Menurut Esrom Aritonang dkk. pendampingan masyarakat ialah proses saling hubungan dalam bentuk ikatan pertemanan dan perkawanan antara pendamping dengan masyarakat melalui dialog kritis dan pendidikan berkelanjutan dalam rangka menggali dan pengelolaan sumber daya guna memecahkan persoalan kehidupan secara bersama-sama serta mendorong tumbuhnya keberanian masyarakat untuk mengungkapkan realitas yang meminggirkan dan melakukan aksi untuk merombaknya.¹⁹

Dari pemaknaan pendampingan di atas, dapat dimaknai juga pendampingan masyarakat karena menurut penulis pendampingan komunitas tak berbeda dengan pendampingan masyarakat, yang dibedakan adalah kelompok kecil (komunitas) dan kelompok besar (masyarakat), dimana pendampingan masyarakat ini merupakan hubungan pertemanan antara seorang pendamping dan masyarakat dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan (*empowerment*), dimana seorang pendamping hanya berperan sebagai mendampingi guna membantu mengungkapkan pikiran dan merumuskan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan masyarakat. Namun demikian pendamping tetap punya peran besar bagi mereka karena masyarakat merasa ada teman yang membantu memecahkan persoalan-persoalan mereka.

¹⁸ M. Marzuki Kurdi, *Makalah Pembuatan Jaringan dan Pendampingan*, tt. hal. 2.

¹⁹ Esrom Aritonang, dkk., *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, In DHARRA, Jakarta, 2001, hal. 13.

Namun juga dalam pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan (*empowerment*) peran partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya, bahkan partisipasi dapat dikatakan memegang peranan sentral. Sebab pembangunan masyarakat berkelanjutan pada dasarnya adalah pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat dengan dampingan dari para pendamping yang memahami persoalan-persoalan masyarakat dengan titik tolak dari kebutuhan masyarakat.

Berhubung partisipasi mempunyai peran sentral, maka perlu proses yang menjadi prasyarat dari terjadinya partisipasi masyarakat yang menunjang pembangunan masyarakat yang berkelanjutan tersebut. Berarti persiapan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi oleh pendamping merupakan salah satu syarat penting demi keberlangsungannya proses pembangunan.

Beberapa yang harus dilakukan pendamping dari sebelum hingga proses pelaksanaan melakukan pendampingan seperti halnya tahap-tahap pendampingan yang diutarakan oleh Esrom Aritonang dkk., yakni integrasi diri dengan komunitas, investigasi sosial dan studi komunitas, perencanaan tentatif, pembentukan kelompok inti, pengorganisasian komunitas, pertemuan komunitas, bermain peran, mobilisasi, evaluasi, refleksi, formalisasi organisasi berbasis komunitas, konsolidasi dan ekspansi.²⁰

Tahap-tahap yang diutarakan di atas dalam prakteknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun bukan berarti tidak dapat dilaksanakan di

²⁰ Buku Pegangan Pendampingan Komunitas Pedesaan, Seri Kesatu, Sekretariat Bina Desa, Jakarta., 1998, hal. 24-34.

lapangan, dan menurut Bapak Marzuki, tahap-tahap yang diutarakan Esrom Aritonang dkk., lahir dari pengalaman di lapangan yang diaplikasikan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi dalam melakukan pendampingan masyarakat sangat membutuhkan kesabaran serta keuletan untuk mendampingi masyarakat dengan tujuan pengembangan dan pemberdayaan (*empowerment*).

b. Batasan Pendampingan Masyarakat

Pendampingan Masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya sebagai suatu sistem sosial sehingga secara mandiri mampu mengarahkan dan mempercepat perubahan-perubahan sosial menuju ke situasi kondisi yang dicita-citakan. Batasan tersebut mengandung makna sebagai berikut:²¹

- 1) Membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, yaitu dengan memperlakukan masyarakat sebagai subjek, bukan objek yang didekati kebutuhan untuk selalu meningkatkan kemampuan kapasitas dan kapabilitasnya.
- 2) Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial artinya bahwa kebutuhan perubahan mengandung konsekuensi terhadap aspek-aspek struktural, kultural dan dinamika proses-proses sosialnya yang multidimensional. Sifat multidimensional berarti bahwa yang dimaksudkan perubahan sosial adalah perubahan sosietaI (*societal change*) yang

²¹ Sumarno, *Tinjauan terhadap Kurikulum Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*, Makalah Sarasehan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Yogyakarta, 2000, hal 1

didalamnya mengandung banyak bidang seperti tata nilai budaya, ekonomi, politik dan hukum yang saling terkait.

- 3) Kemandirian merupakan nilai intrinsik dalam proses perubahan yang terarah dan terencana, artinya tidak membenarkan setiap perubahan yang menumbuhkan ketergantungan. Disamping itu kemandirian satuan sosial harus dimaknai secara kontekstual, sistemik, dan sinergik, artinya ada keharusan untuk terjadi kesesuaian dengan posisi dan peranannya yang didalam sistem yang lebih besar dan terjadi keterpaduan minimal pada tingkat konsep dengan peran dari berbagai segmen sosial lainnya.
 - 4) Ungkapan menuju kondisi yang dicita-citakan mengandung makna bahwa pendampingan masyarakat itu bersifat normatif sarat nilai. Kondisi yang diinginkan dan bagaimana cara pencapaiannya sangat bergantung pada apa yang dianggap baik dan benar oleh masyarakatnya, dengan awan perangkat nilai inti dan instrumental yang jelas serta teruji bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- c. Pendekatan dalam Pendampingan Masyarakat

Dalam setiap pendekatan yang dilakukan oleh kelompok pendampingan masyarakat menurut Arief Budiman meliputi dua unsur pokok yaitu pada masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi (ekonomi) dan masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif.²² Pendekatan tersebut adalah:²³ *Pertama*, melalui pendekatan *top down*, yaitu sebuah upaya terencana untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sosial kepada masyarakat

²² Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 13.

²³ Moeljarto, *Politik Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal. 42-50.

melalui kebijakan dan keputusan langsung dari pusat (birokrasi). Pada pendekatan ini cenderung lebih memanjakan masyarakat dan yang berperan dalam pengembangan masyarakat adalah dari pihak pusat atau birokrasi yang terlalu berorientasi pada pembangunan masyarakat desa dan dianggap sebagai paradigma pembangunan yang konvensional. Pola kebijakan yang diambil pada *top down* ini dilaksanakan lebih kuat dari atas ke bawah. *Kedua*, melalui pendekatan *bottom up*, yaitu sebuah pendekatan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat dengan mengembangkan rasa keefektifan politis yang dapat mengubah penerima pasif dan relatif menjadi masyarakat aktif yang memberikan kontribusinya dalam pendampingan masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan akan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Begitu pula prinsip pembangunan yang bertumpu pada partisipatif ini menegaskan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama. Sehingga yang memiliki peran penting adalah masyarakat. Seperti cuplikan ajaran Lao Tse (700 SM) yang berbunyi: “Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka, belajarliah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu, bangunlah dari apa yang mereka punya, tetapi pendamping yang baik adalah, ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata: “Kami sendirilah yang mengerjakannya”.²⁴

²⁴ Achmad Wazir Wicaksono & Taryono Darusman, *Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat*, PT. Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat, 2001, hal. 5

G. Metode Penelitian

Segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ilmiah, baik mengenai uraian atau penyimpulan maka diperlukan metode, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan metode itu mengikuti sifat penelitian.

Untuk mengetahui konsep strategi pendampingan masyarakat dan bagaimana implementasinya yang dilakukan oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta. penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Penentuan Subyek Penelitian

Subyek penelitian bisa ditemukan dengan memilih informan untuk dijadikan *key informan* di dalam pengambilan data di lapangan.²⁵ Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengurus Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta. yakni ketua, sekretaris dan pengurus di bidang pendamping lapangan serta masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pendampingan masyarakat. Selain subyek yang ditentukan di atas, penulis juga mengambil sumber dari buku-buku, manuskrip, makalah-makalah, artikel-artikel, dan jenis-jenis penerbitan, penulisan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini dan juga dijadikan sebagai subyek sekunder dalam penelitian ini.

Obyek penelitiannya yang pertama adalah gambaran problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Guna memudahkan fokus dalam penelitian disini penulis mengambil sampel dari salah satu masyarakat yang didampingi oleh Yayasan Patria Nusantara, yaitu masyarakat Dukuh Gunungkrambil Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Alasan yang mendasari

²⁵ Sukardi, *Penelitian Subjek Penelitian*, Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1995, hal.7-8.

penulis memilih wilayah/lokasi ini antara lain, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang pertama kali didampingi oleh YPN dan masih berlanjut hingga sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir ini wilayah tersebut juga menjadi wilayah fokus kegiatan dampingan YPN. Obyek kedua adalah pelaksanaan pendampingan oleh Yayasan Patria Nusantara Yogyakarta.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah :

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁶

Teknik wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan atau terlibat, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan.²⁷

Pada teknik wawancara ini menggunakan teknik wawancara jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.²⁸ Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, menyusun pokok-pokok tersebut dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan pada jenis wawancara ini tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1995, hal. 192.

²⁷ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, Aksara, 1987, hal. 113.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. Ke 17, 2002. hal. 136.

pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara semestinya.

b. Observasi

Metode kedua yang digunakan dalam pengumpulan data yakni observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.²⁹

Pada observasi/pengamatan ini menggunakan teknik pengamatan terbuka, dimana pengamat terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan mereka.³⁰

c. Dokumentasi

Teknik atau metode yang ketiga digunakan dalam pengumpulan data yakni dokumentasi, teknik ini adalah suatu teknik dimana data diperoleh dari

²⁹ *Ibid*, hal. 146-147.

³⁰ *Ibid*, hal. 146-147.

dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis, seperti : buku-buku, notulensi, peraturan-peraturan, catatan-catatan harian dan sebagainya.³¹

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah :

- 1) Laporan-laporan konfindental, yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi, misalnya : laporan pertanggungjawaban atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana dari yayasan yang diteliti.
- 2) Laporan umum, yaitu laporan tentang suatu kegiatan yang ditulis atau disampaikan oleh suatu majalah, jurnal, atau media lainnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan yayasan yang diteliti.
- 3) Dokumen resmi yayasan yang diteliti.
- 4) Buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Yayasan Patria Nusantara, serta narasumber yang diwawancarai.
- b. Data sekunder, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan dinamika strategi pendampingan masyarakat dalam rangka upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik berupa buku-buku penunjang, pendapat tokoh maupun karya-karya lain yang menunjang.

³¹ *Ibid*, hal. 149.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Yayasan Patrria Nusantara Yogyakarta, kemudian unit analisis individu aktor lapangan, fokus analisis ini tentunya adalah individu yang merupakan orang kunci di Yayasan Patria Nusantara yang hendak di teliti. Dengan pertimbangan orang kunci acap kali mempengaruhi arah dan dinamisasi yayasan ini.

5. Keabsahan Data

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal ini akan di capai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara atau apa yang di katakan di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi, selain itu pula dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³²

6. Teknik Analisa Data

Analisa data ini dilakukan setelah data selesai dikumpulkan. Data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil ,menyimpulkan kebenaran-kebearan yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

a. Menjelaskan Data

Bahan-bahan keterangan yang telah berhasil dihimpun dalam penelitian dan telah diatur dengan sebaik-baiknya, kemudian dijelaskan dan diterangkan arti

³² *Ibid*, hal. 178.

dan makna yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini biasanya melalui tahap diskusi dan interpretasi.

b. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi dan interpretasi terhadap data seperti tersebut diatas, maka akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan adalah tersusun berdasarkan alasan-alasan hasil diskusi dan interpretasi terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian. Secara teknis kesimpulan adalah jawaban-jawaban atas masalah penelitian yang telah dirumuskan pada rencana penelitian.³³



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta 2000, hal 35-36.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pembahasan pada penulisan ini diarahkan terutama untuk mengkaji gambaran problematika masyarakat yang didampingi serta bagaimana pelaksanaan pendampingan yang dikembangkan oleh Yayasan Patria Nusantara. Dengan demikian dari pembahasan tentang ini penulis mengambil kesimpulan:

1. Masyarakat yang didampingi oleh Yayasan Patria Nusantara adalah masyarakat yang termarginalkan terutama masyarakat pedesaan, seperti yang telah di bahas tentang gambaran masyarakat desa Sidorejo bahwasannya masyarakat tersebut memiliki berbagai problematika yang tengah mereka hadapi, yakni:
 - a. Sarana pendidikan yang kurang memadai sehingga mayoritas hanya tamatan SD bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali, di sisi lain merosotnya tingkat pendidikan keluarga karena kekurangan biaya.
 - b. Terjadinya rawan pangan dan makin menciutnya lapangan kerja akibat bangkrutnya usaha ekonomi yang dikelola oleh sekelompok masyarakat.
 - c. Pengaruh musim yang tidak menentu berdampak gagal tanam dan panen, apalagi pertanian merupakan mayoritas dari mata pencaharian penduduk yang mana pertanian ini sangat tergantung dengan musim (tadah hujan).
2. Pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Patria Nusantara adalah: sebelum terjun ke lapangan Yayasan Patria Nusantara telah membuat konsep dasar pendampigan yang antara lain bertolak pada manusia yang

merupakan makhluk yang dijadikan oleh Allah segai khalifah dimuka bumi yang telah dikaruniakan berbagai kelebihan di antara makhluk lainnya, yakni oleh Allah manusia dijadikan khalifah untuk mengelolah bumi sebaik-baiknya dalam arti sebagai khalifah manusia harus dilindungi dari kehilangan asas pokok dalam dirinya, yakni kehilangan jiwa, kehormatan, berpikir/berkreasi, berketurunan dan mendapat akses pekerjaan (harta).

Kemudian dalam pelaksanaan pendampingan ini oleh Yayasan Patria Nusantara melakukan rekrutmen pendamping yang dimulai dari tingkat Yayasan Patria Nusantara dan pendamping lokal dari bagian kelompok masyarakat yang didampingi yang tentunya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang pendamping yang ditentukan oleh Yayasan Patria Nusantara. Setelah perekrutan pendamping melakukan tahapan pendampingan, antara lain:

- a. Pengenalan
- b. Pengakraban Diri
- c. Tahapan Pencarian Data dan Fakta secara benar
- d. Analisis (Tahap Berpikir Bersama dan Bersiasat Bersama)
- e. Penguatan
- f. Pembuatan Jaringan
- g. Membuat Rancangan Aksi Bersama (Tahap Berencana Bersama)
- h. Aksi Bersama
- i. Evaluasi Bersama
- j. Diakhiri dengan Refleksi Bersama

B. Saran-saran

1. Bagi aktivis pengembangan masyarakat umumnya dan para pendamping lapangan di Yayasan Patria Nusantara pada khususnya:
 - a. Koordinasi perlu ditingkatkan, mengingat tempat tinggal antar pendamping saling berjauhan dan kesibukan masing-masing di luar program yang ada.
 - b. Eklusivitas, eksklusivitas, dan antagonisme adalah proses-proses yang mengkerdilkan eksistensi lembaga atau yayasan pengembangan masyarakat. Untuk menghindarinya sebaiknya rasionalitas berpikir dengan pendekatan substansialistik serta bersatunya kekuatan masyarakat dengan menghargai pluralitas dijadikan standar aktivitas.
2. Bagi Fakultas Dakwah, khususnya Jurusan PMI, sebagai institusi yang mengkaji dakwah dalam lingkaran kesadaran akademik serta mengkaji pengembangan masyarakat, sebaiknya memberikan ruang proporsional pada penelitian lapangan serta interaksi sosial. Proses kunci dari semua itu adalah perubahan dan hubungan sinergis antara dosen dan mahasiswa dengan meninggalkan tradisi feodalisme.
3. Bagi yang tertarik meneliti tema yang sama, sebaiknya variabel-variabel utamanya dilengkapi dengan validitas data dan pendekatan yang lebih relevan, sehingga kajian serupa akan lebih komprehensif.

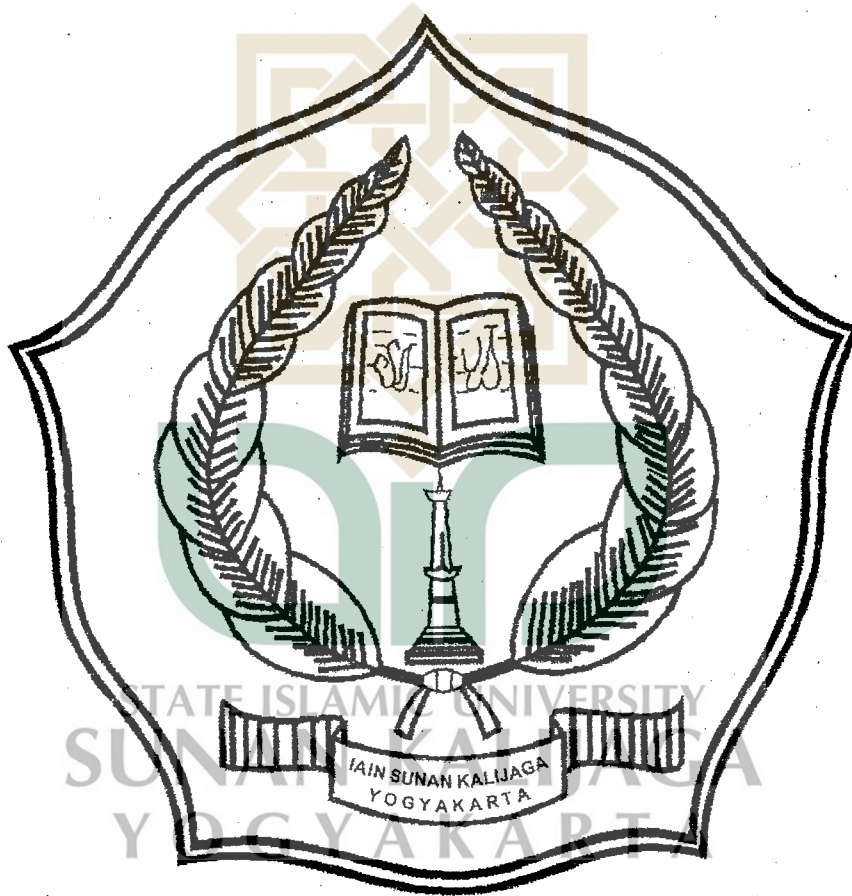
C. Penutup

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, terutama mengenai penggunaan metode dan perumusan isi. Oleh

karenanya penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca dan pemerhati sebagai masukan.

Kepada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, penulis haturkan banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan itu dibalas yang setimpal oleh Allah SWT.





DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Esrom, dkk., *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta, Sekretariat Bina Desa, 2001.
- Aziz, M. Imam, Rumusan Yayasan Patria Nusantara, Direktur Eksekutif YPN, 1990.
- Baker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanisius 1994.
- Bryson, John M. *Perencanaan Strategis; Bagi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Buletin Bina Desa No.67, Oktober 1988.
- Bulletin Simpul-Belajar Kita, Volume II, Edisi Orang Kampung, Agustus 2001, Yayasan Puter, Bogor.
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- , *PRA: Memahami Desa Secara Partisipatif*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Collier, William L. dkk. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa, Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun*, Terj. Sajogyo, Jakarta, 1996, Yayasan Obor Indonesia.
- Fakih, Mansour, *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2001.
- Hugof, Sahat Simarmoro, (penterjemah), *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, CV. Rajawali, 1976.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Thesis*, Bandung, Aksara, 1987.
- Kurdi, A. Marzuki, *Makalah Pembuatan Jaringan dan Pendampingan*, tt.
- , *Makalah Pengalaman Lapangan Konsep Pendampingan Masyarakat pada Wilayah Lahan Kritis di Kabupaten Gunung Kidul, Madura, 2003.*

- Leibo, Jefta, *Sosiologi Pedesaan : Mencari Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, PT. Andi Offset, Jogjakarta, 1995.
- Moeljarto, *Politik Pembangunan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. Ke 17, 2002.
- Mubyarto, *Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia*, PT. Aditya Media, Yogyakarta, 1996. Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1998.
- Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan-Kumpulan Bacaan*, Jilid 1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- , *Sosiologi Pedesaan-Kumpulan Bacaan*, Jilid 2, Yogyakarta, 1992, Gadjah Mada University Press.
- Salim, Peter, Yenny Salim, Edisi Pertama, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, PT. Modern English Press, 1991.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1995..
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999.
- Solaeman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar; Teori dan Konseptual Ilmu Sosial*, PT. Presco, Bandung, 1995.
- Sukardi, *Penelitian Subyek Penelitian*, Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1995.
- Sumarno, *Tinjauan terhadap Kurikulum Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam*, Makalah Sarasehan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Yogyakarta, 2000.
- Supartono, '*Pendidikan Musyawarah Rakyat*' *Semua Orang adalah Guru, Semua Tempat adalah Sekolah*, Sekretariat Bina Desa, Jakarta, 2001.
- Supono, Supriyadi Sastro & Soeharto Siswopangripto, *Desa Kita*, PT. Alumni, Bandung, 1984.
- Supriatna, Tjahya, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Wicaksono, Achmad Wazir & Taryono Darusman, *Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat*, PT. Simpul Belajar Pengorganisasian Masyarakat, 2001.